



NOTULA

Dasar : 1. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/BP/SK/PW1.1.1/11/2024 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI PENGADILAN
2. Undangan Ketua PTA Bandar Lampung Tanggal 11 April 2025

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2025

Pukul : 08.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Aula PTA Bandar Lampung

Acara : *Sharing Session* SMAP

Peserta Rapat : Seluruh Tim SMAP Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. (Narasumber)

Hasil Rapat:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

- Harapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kepada narasumber untuk dapat memberikan pengalaman sebagai orang yang terlebih dahulu berhasil membangun SMAP di Pengadilan Agama Bantul. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung meminta agar dibuka semuanya terkait SMAP supaya tim Pembangunan SMAP di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bisa melihat secara nyata. Meskipun Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak ditunjuk oleh Bawas sebagai satker yang diwajibkan dalam Pembangunan SMAP tetapi atas inisiatif sendiri, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melihat bahwa SMAP itu bagus dalam rangka memastikan bersihnya suatu satker dan bisa bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas di kantor.
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bersungguh-sungguh dalam Pembangunan SMAP. Jauh sebelum adanya SMAP Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sudah membuatkan lagu yang kaitannya dengan SMAP yang berjudul "Jauhi KGSP (Korupsi, Gratifikasi, Suap dan Pungli). Lagu tersebut sudah dihafalkan oleh seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan 14 (empat belas) satker di provinsi Lampung.

2. Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. (Narasumber)

- Dimulai dengan pembukaan, kemudian Narasumber mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (Dr. H. Insyafli, M.H.I.) adalah bapaknya SMAP. Lalu beliau menampilkan rekam jejak digital yang tidak bisa terbantahkan sebelum adanya SMAP pada tahun 2021 bapak Dr. H. Insyafli, M.H.I. sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa terkait SMAP dengan judul penguatan KGSP (Korupsi, Gratifikasi, Suap dan Pungli) pada waktu beliau menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan narasumber langsung dari KPK.
- Kunci keberhasilan Pembangunan SMAP adalah komitmen dan sosialisasi internal. Setelah sosialisasi internal telah dilaksanakan dilanjutkan dengan sosialisasi pihak luar yaitu pihak berperkara dan stakeholder. *Public campaign* penting untuk memberitahu bahwa satker kita bersih anti pungli parkir pun gratis. Jika di kantor tersebut tidak ada pungli maka sudah lulus SMAP tanpa diberikan sertifikat oleh Negara dan penghargaan oleh Mahkamah Agung.
- Tahapan Pembangunan SMAP yaitu Deklarasi/Pencanangan, Sosialisasi, Struktur Organisasi, Menyusun Program Kerja, Implementasi/Risk Register dan Evaluasi.
- Implementasi lebih substansi daripada dokumen namun apabila satker ingin melakukan pencanangan dan menerapkan template sudah ada dari Mahkamah Agung. Template ini berisikan tentang struktur organisasi, kebijakan SMAP, manual SMAP dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang harus dipenuhi. Dalam SMAP diperlukan hanya 12 (dua belas) *Standar Operasional Prosedur* (SOP) karena dianggap *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang lain sudah ada di WBK.
- Halaman kantor perlu dicat karena merupakan bentuk kampanye sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa kantor tersebut sudah SMAP atau anti penyuapan. Bentuk kampanye seperti logo di halaman kantor, sticker SMAP di pintu kantor, pin SMAP dan lagu SMAP.
- Dasar hukum tentang SMAP yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System dan Kebijakan Integritas Mahkamah Agung.
- Kebijakan anti penyuapan diantaranya tidak mentoleransi segala bentuk suap (zero tolerance), wajib melaporkan setiap dugaan penyuapan, perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Drs. Damsyi, M.H. (Hakim Tinggi)

Implementasi lebih penting daripada dokumen kita sepakat sebab bagi yang sadar aturan tentang larangan perbuatan jahat itu sudah terlalu banyak apalagi yang beragama islam, Al-qur'an saja sudah cukup ditambah hadits lagi. Dalam apel senin tadi pagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar

Lampung sudah menyampaikan hadits tentang itu bahwa yang menyogok dan yang disogok itu tempatnya di neraka belum lagi aturan-aturan lain. Jadi, bagi yang jahat ditambah aturan 100 pasal pun tidak ada gunanya bagi yang sadar cukup Al-qur'an dan hadits. Oleh karena itu, saya menghimbau atau boleh usul tiap Pengadilan Agama ada lagi dari Pengadilan Tinggi Agama untuk menyampaikan peringatan-peringatan ataupun nasehat yang bisa diputar sekitar pukul 10.00 WIB atau pukul 13.00 WIB untuk mengingatkan kemudian tausiyah pada hari Jum'at, kalau di Jakarta ada bimbingan mental setiap senin pagi untuk mengingatkan.

Jawaban Narasumber :

- Ikrar itu penting setiap apel setiap hari tertentu kantor kita ada tausiyah bimbingan mental dan nasehat-nasehat yang diputar itu sebagai pengingat sama halnya dengan hari Jum'at kaum muslimin sedunia. Di kantor syarat untuk SMAP WBK itu setiap dua jam sekali selalu diputar audio ada surat dari Sekma yang berbunyi jangan hubungi kami bantu kami untuk berlaku bersih dengan cara tidak memberikan sesuatu apapun hadiah kepada petugas kami. Dulu kami waktu di Bantul diwajibkan putar ngaji memang harus diingatkan. Itulah internalisasi dari pimpinan dan rekan-rekan Hakim saling mengingatkan, menasehati dan menguatkan agar tidak terjerumus.

2. Dr. Dra. N. Siti Suwaebah, M.H.

Saya sebetulnya agak rancu kita sebelumnya sudah membangun Zona Integritas bahkan sudah banyak satker yang sudah mendapatkan penghargaan tapi untuk Pembangunan SMAP ini ternyata masih sangat sedikit padahal tadi melihat teorinya sebetulnya mungkin SMAP ini bagian dari Zona Integritas semestinya. Tapi satker yang sudah WBK atau WBBM mungkin belum dinyatakan sebagai satker yang mendapatkan atau diakui yang sudah melaksanakan SMAP. Didalam SK Bawas tidak terlalu banyak dari segi dokumen jadi sebetulnya penguatannya Dimana atau perbedaannya Dimana?

Jawaban Narasumber :

- Kita membangun SMAP ini dengan gembira, dengan sosialisasi itu menyenangkan jadi tidak selalu rapat. Saya memahami kalau WBK yang bisa korupsi siapa sih, yang bisa korupsi itu hanya pejabat yang berkaitan dengan keuangan seperti bendahara, sekretaris, ketua dan kasubag keuangan. SMAP ini bisa dilakukan oleh siapa saja, SMAP ini lebih menyeluruh karena teman-teman yang dilapangan seperti satpam yang menerima rokok itu penyuapan, jadi penyuapan bisa dilakukan oleh siapa saja berbeda dengan korupsi yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat tertentu. Kalau sudah SMAP otomatis sudah WBK dan WBBM karena secara normatif syarat diusulkan menerapkan

SMAP ini sudah WBK atau WBBM, memang perbedaannya tidak signifikan WBK, WBBM dan SMAP berjalan beriringan. SMAP hanya fokus area V di pembangunan zona integritas bagian pengawasan.

3. Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.

Berkaitan dengan risk register dalam pembangunan SMAP yang harus dilakukan pada setiap tahapan proses manajerial kelembagaan, Ketika setiap tahap itu sudah dilakukan rumusan dan pencegahan ternyata masih ada kelemahannya artinya masih terdapat ditemukannya pelanggaran terhadap risk register yang sudah dirumuskan. Apa yang bisa dilakukan secara kelembagaan maupun dalam Pembangunan SMAP ini. Kemudian ditingkat banding apakah ada kewajiban untuk di satker ditingkat pertama berkaitan dengan Pembangunan SMAP ini menjadi pengaruh besar di Tingkat banding misalnya disalah satu satker dibawah Pengadilan Tinggi Bandar Lampung itu ditemukan adanya penyuaipan kemudian sudah ditindak lanjuti, dilakukan pemeriksaan oleh tim dan dilaporkan ke bawas adakah pengaruhnya terhadap kami di Tingkat banding yang sedang membangun SMAP?

Jawaban Narasumber:

- Setiap proses alur perkara itu harus ada pencegahannya termasuk juga di kesekretariatan jadi bagaimana kabag keuangan ini tidak menerima dari pemborong itu pencegahannya bagaimana sebagai contoh maka diadakan lelang tidak menunjuk langsung. Kita sudah membuat tahapan-tahapan pencegahan tapi masih saja. Jadi implementasinya karena belum selesai dengan dokumen maka ditambah dengan CCTV. kalau ada kelemahan perbaikan berkelanjutan. Apakah kalau satker terdapat hukuman disiplin atau ada pelanggaran PTA kena imbasnya? Iya karena PTA sebagai garda terdepan. Kalau satker sedang menerapkan WBK, WBBM dan SMAP terdapat hukuman disiplin atau ada pengaduan yang sifatnya OTT maka langsung gagal karena itu merupakan temuan yang tidak bisa dimaafkan namun apabila yang melaporkan adalah pimpinan maka tidak masalah justru itu prestasi bagi pimpinan. Jika ada pelanggaran kemudian Ketua menutupi artinya sekongkol.

4. Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Apakah dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan Zona Integritas apakah bisa dipakai untuk perlengkapan dokumentasi di SMAP. Kemudian didalam pengusulan SMAP apakah ada jangka waktu, umpunya dari sejak awal pendeklasari kemudian penelusuran dokumentasi sampai dengan pelaporan dan pengiriman dokumentasi itu rentang waktunya berapa lama. Disamping kalau tadi juga disampaikan ada semacam sosialisasi itu

memerlukan waktu yang relative lama apalagi dibarengi dengan *Public campaign*?

Jawaban Narasumber :

Bisa Bapak/Ibu sesungguhnya dokumen SMAP sudah ada di ZI contohnya dokumen wajib harus membuat SOP pengaduan sebenarnya itu sudah ada kemudian benturan kepentingan juga sudah ada di area V. kemudian kita membuat SOP atau dokumen penanganan pengendalian gratifikasi (UPG) sebagai contoh misalnya kemarin waktu lebaran ketua panen parcel dari Bank itu implementasinya harus dilaporkan lewat KPK. Untuk wilayah Jawa Tengah sudah banyak dan Bandar Lampung belum pernah lihat pengumuman. Jadi dokumen substansinya sama itu bisa digunakan Ganti judul saja karena judul SMAP maka korp surat nya juga SMAP dan yang dulu ZI diganti SMAP, aktivitasnya juga sama pada saat kita kampanye untuk ZI Pembangunan menuju WBK kita harus kampanye pada saat kita SMAP juga kampanye, jadi satu kampanye bisa digunakan untuk Pembangunan ZI dan SMAP. PA Bantul pada saat ditunjuk SMAP belum WBK, jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui, semoga tahun depan Bandar Lampung ada umpannya yang paling siap PTA lebih tahu itu bersurat kepada Kepala BAWAS mohon tahun depan kami juga ingin mewakili wilayah Lampung salah satu satker ditunjuk untuk dinilai membangun SMAP.

5. Yosrinaldo Syarief, S.H., M.H.

Saya hanya menanggapi terkait dengan parcel jadi kalau tadi disana menerimakemudian lapor kami disini ketua PTA berniat di awal maret kami memberi tahu kepada pihak terkait untuk tidak memberikan parcel. Lebih bagus mana kita terima dulu baru lapor atau sejak awal kita bilang kepada bank. Jadi tahun ini yang namanya bendahara, PPK, Kuasa pengguna anggaran, Kabag Umum keuangan tidak menerima lagi karena sejak awal sudah diberi tahu jangan kirim ke kantor maupun ke rumah apalagi sampai kerumah dinas, sebenarnya sejak tahun lalu ketua PTA sudah menolak pemberian parcel yang diberikan.

Jawaban atas tanggapan :

Ini implementasi SMAP kalau dokumen ada SK, ada formulir tapi tidak ada pelaporannya karena yang diinginkan Bawas laporannya, jadi besok Bawas ke PA ambarawa tidak perlu dokumen-dokumen begitu. Sekali lagi dokumen tidak terlalu penting tapi ini loh ada parcel dilaporkan dan sudah dapat apresiasi dari Kabawas jadi penting membuat laporannya. Mana yang lebih laporannya atau kita ditolak saja, sebenarnya dua-duanya dilaporkan jadi kalau kita menerimanya tidak masalah tapi kita laporkan kalau kita tolak,

pada saat kita tolakpun dilaporkan barangnya difoto terlebih dahulu sebagai eviden. Jadi dilaporkan baik jika menerima maupun menolak.

6. Dra. Sartini, S.H., M.H.

hakikat SMAP adalah penguatan implementasi WBK sehingga yang difokuskan adalah area V. untuk pengusulan ini tidak harus pakai proposal akan tetapi bagaimana kita mendahului impelemntasi SMAP sudah kita laksanakan kemudian nanti pada akhirnya setelah fix setidaknya sebelum oktober menyampaikan surat permohonan agar ditetapkan sebagai wilayah yang melaksanakan SMAP untuk di Tingkat PTA kemudian secara teknis untuk melaksanakan SMAP ini jadi beriringan antara impelmetasi dengan dokumen-dokumen yang memang harus kita susun karena seperti yang disampaikan tadi rangkuman ZI memang banyak di tata menjadi satu kesatuan dengan dokumen SMAP yang harus kita susun, itu saja kami ingin mendapatkan penegasan !

Jawaban Narasumber :

- benar sekali yang penting itu ikrar, ikrarnya bagaimana tidak atur yang penting ikrar saja jadi kita punya dokumen ikrar kemudian lapor kepada bapak dirjen. SMAP ini merupakan program prioritas bapak Dirjen jadi bapak Dirjen akan mengapresiasi satker yang menerapkan SMAP karena ditunjuk secara formal, beberapa lainnya inisiatif sendiri karena sebagai aparatur peradilan memang harus bersih baik ada SMAP atau tidak. Kemudian saya senang sekali jika PTA Bandar Lampung di bulan oktober-desember atau hari ini membuat surat, tahun depan ditunjuk dan dinilai maka PTA Bandar Lampung yang pertama karena biasanya untuk satker ditingkat pertama, Tingkat bandingan belum ada. Tingkat banding mudah karena risk regiternya tidak terlalu sulit dibandingkan dengan yang berhadapan dengan pencari keadilan secara langsung. Jangan takut dengan dokumen-dokumen karena penting itu integritasnya.

Nama Notulis,



Heni Permatasari, S.I.P.
NIP 199611102023212037

Mengetahui,
Ketua PTA Bandar Lampung,



Dr. Insyafli, M.H.I.
NIP 196009061989031004